

ABSTRAK

Aulia Rahman, NIM. 1213030025, (2025): *Hak dan Wewenang Pemerintah Aceh Tentang Pembentukan Bendera dan Lambang Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.*

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menimbulkan polemik ketatanegaraan karena terkait tarik-menarik antara otonomi daerah, intervensi pemerintah pusat, dan isu identitas lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembentukan qanun, dasar hukumnya, serta meninjau hak dan wewenang Pemerintah Aceh dari perspektif siyasah dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan berdasarkan teori kedaulatan rakyat, teori delegasi kekuasaan, dan konsep pemerintahan daerah menurut Al-Mawardi. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan akademisi hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2013 memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai bentuk delegasi kewenangan dari pusat, serta diteguhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, implementasinya menghadapi kendala politik akibat intervensi pemerintah pusat dan perdebatan terkait kemiripan simbol dengan atribut Gerakan Aceh Merdeka.

Ditinjau dari siyasah dusturiyah, pembentukan qanun ini merupakan manifestasi kemandirian politik daerah. Meski sah secara hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan karena kurangnya musyawarah inklusif yang mencerminkan keadilan dan persamaan seluruh elemen masyarakat Aceh.

Kata Kunci: *Qanun Aceh, Bendera dan Lambang, Otonomi Khusus, Pemerintahan Daerah, Siyasah Dusturiyah.*

